DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 disusun sebagai Pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini memuat hal-hal yang diperkirakan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pada bidang urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2025 dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berisikan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata Pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai bahan masukan serta evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sanggau, 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sanggau,

Allan, S.ST
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP.196906081994031012

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
BAB IV PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

No.		Uraian	Hal
1.	Tabel II.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah	8
2.	Tabel III.1	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025	20
3.	Tabel III.2	Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Perubahan Renja PD Tahun 2025	28
4	Tabel III.3	Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Renja Tahun 2025	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan bagian dan perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Sanggau. Perubahan Rencana Kerja (Renja) memuat informasi penting yang akan dikerjakan pada sisa waktu satu tahun, oleh karena itu di dalamnya harus memuat tujuan, hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, capaian renstra, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya pada pasal 3 dan 4, melalui kebijakan ini Kepala Perangkat Daerah diwajibkan melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan membuat Perencanaan Strategis yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran setiap tahunnya.

Keterkaitan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55390, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau;
20. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Sanggau;
21. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah selain sebagai salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan sebuah kerangka atau kesaluan konsep, prosedur, dan alat bagi pimpinan dan seluruh staf secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan Perangkat Daerah. Selain itu juga sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan staf dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2025

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Membenkan arah bagi seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam periode renstra.
2. Menyediakan data secara resmi bagi seluruh staf untuk menyusun perubahan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.
3. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf dalam Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah.

4. Menetapkan komitmen kinerja yang disepakati bersama pimpinan dan staf yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur/barometer kinerja Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembankan serta akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dituangkan dalam (4) Empat Bab sebagai berikut .

1 BAB I PENDAHULUAN
   - 1.1 Latar Belakang
   - 1.2 Landasan Hukum
   - 1.3 Maksud dan Tujuan
   - 1.4 Sistematika Penulisan
2. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN
   - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025
   - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau
   - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
   - 2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025
   - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4 BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan, didukung dana yang berasal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025 pagu murni yang dialokasikan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau sebesar **Rp. 9.956.330.052,90** (Sembilan milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima puluh dua koma sembilan puluh rupiah) terdiri dari anggaran belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi :
   a. Belanja Pegawai sebesar Rp 3.745.716.778,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
   b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 5.152.274 649,90 (Lima milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh rupiah).
   c. Belanja Hibah PKK sebesar Rp.940.000.000,00 (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
   d. DAU-SG sebesar Rp.825.901 633,00 (Delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
2. Belanja Modal sebesar Rp. 118.338.625,00 (Seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Pada triwulan I Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mengalami refocusing dan penambahan anggaran, pengurangan pada pagu belanja perjalanan dinas dan belanja modal peralatan komputer dengan pagu pergeseran 1 sebesar **Rp. 9.665.273.237,90** (Sembilan milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus

tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah) sebagai berikut

1. Belanja Operasi :
   a. Belanja Pegawai sebesar Rp 3 745.716 778,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
   b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4,913 017,649,90 (Empat milyar sembilan ratus tiga belas juta tujuh belas ribu enam ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh rupiah).
   c. Belanja Hibah PKK sebesar Rp 940.000.000,00 (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
   d. DAU-SG sebesar Rp.825.901.633.00 (Delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
2. Belanja Modal sebesar Rp 66.538.810,00 (Enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Penambahan pagu sebesar Rp. 363.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) sebagai berikut :

a. Hibah PKK sebesar Rp.323.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah).
b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.40 000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).

Sehingga pagu Perubahan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau sebesar **Rp. 10.021.864.169,00** (Sepuluh juta dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dapat dijelaskan melalui tiga hal pokok yaitu (1) Capaian Indikator Kinerja Utama, (2) Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, serta (3) Akuntabilitas Keuangan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau, maka Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun berkenaan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dan capaian Renstra DPM Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada Tabel II 1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Periode Pelaksanaan Tahun 2025.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
1	2	3	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

| | | |

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

| | | |

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-1) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+9		11=10/5x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	150 Keluarga	50.000.000,00	1 Dokumen	1.341.289.259,00	1 Dokumen	988.607.150,00	0 Dokumen	5.000.004,00	0 Dokumen	6.656.364,00	0 Dokumen	1.361.345.352,00		252,61 / 588,00	DPMPD
		Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Relasi Suami Istri, antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Relasi Suami Istri, Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	150 Keluarga	50.000.000,00	0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00		0,00	DPMPD
		Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	80 Keluarga	136.145.000,00	0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00		0,00	DPMPD
					14.709.863.731,00		9.585.403.379,00		8.993.271.237,00		1.895.005.928,00		1.895.005.928,00		11.080.409.307,00		3.820.158.761,51	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										10,50		17,84						
Predikat Kinerja										Sangat Rendah		Sangat Rendah						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: Kegiatan yang tahun sebelumnya terlaksana dan tidak dianggarkan pada Rencana Anggaran Kas (RAK)																		

Disetujui,
Sanggau, 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sanggau

ALI[illegible]
Pembina Tingkat I/IV b
NIP. 19690[illegible] 199403 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 serta pencapaian kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Sampai pada semester pertama triwulan I Tahun Anggaran 2025 capaian kinerja keuangan sebesar **17,64%** dan target kinerja yang belum sesuai dengan target program sehingga dikategorikan sangat rendah karena belum optimalnya semua sub kegiatan dilaksanakan, terkait dengan penginputan pagu kegiatan pada RAK, pelaksanaan kegiatan pada sub-sub kegiatan belum sepenuhnya dilaksanakan dan untuk pembinaan ke desa-desa sudah berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Sanggau Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau merupakan penjabaran bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja secara menyeluruh.

Pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan berhasil jika didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kualitas pegawai
2. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi
3. Sarana dan Prasarana Pendukung untuk pelaksanaan tugas
4. Memiliki Kompetensi pada bidang tugasnya masing-masing

2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara normatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau adalah :

1. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
2. Belum optimalnya perkembangan kawasan pedesaan;
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan administrasi desa;
4. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan aparatur desa; dan
5. Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan desa.

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD 2025

Terhadap Perubahan RKPD 2025 pada beberapa Sub Kegiatan mengalami beberapa perubahan/pergeseran sebagai berikut :

1. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk menunjang aktifitas harian kantor.
2. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa, Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa, dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa menggeser pagu untuk belanja modal 1 (satu) unit laptop.
3. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk menunjang aktifitas lapangan.
4. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan untuk menunjang bahan bakar kendaraan esselon II dan III.
5. Tambahan hibah PKK.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan dalam penyusunannya memperhatikan

aspirasi dan pendapat melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2024 Tingkat Kecamatan tentang penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa yang lebih baik melingkupi Administrasi Manajemen Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Aset Desa, Penataan dan Kerja sama Desa dan Pemberdayaan Kelembagaan dan evaluasi tingkat capaian kinerja semester pertama triwulan I tahun 2025

Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan Misi Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Sanggau

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau memiliki misi tentang pelayanan yang dapat diandalkan, baik untuk saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang dan harus mampu menerima berbagai perubahan atau tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih berkualitas, baik perubahan berskala nasional, regional maupun lokal/daerah.

Berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta jenis pelayanan yang diberikan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mempunyai Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

Setiap Perangkat Daerah pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau, dengan demikian tujuan dapat diartikan sebagai kondisi jangka waktu yang diinginkan, yang dinyatakan dengan istilah umum dan kualitatif yang diharapkan dapat dicapai pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun (2025-2026) kedepan. Sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2026 tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah
2. Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Desa

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mengacu pada RPJPD misi ke 3 (tiga) yaitu : Pembangunan Regulasi (Transformasi Tata Kelola) dan misi ke 6 (enam) yaitu : Pembangunan Kewilayahan (Prinsip Adil dan Merata).

2. **Sasaran**

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPemdes
2. Meningkatnya Status Desa.
3. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa.

Untuk mewujudkan misi tersebut maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja, Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mencakup penentuan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program merupakan penjelasan/penjabaran dan sub urusan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjelasan/penjabaran kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan merupakan penjelasan/penjabaran aktivitas atau layanan kerja nyata dan program dan kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau mengalami beberapa perubahan/pergeseran pada pagu beberapa sub kegiatan dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja dan anggaran pada triwulan I Tahun 2025, yaitu pada pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang akitifitas harian kantor dan penunjang kegiatan pada sub kegiatan pada masing-masing bidang program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau dan menunjang sub kegiatan lainnya. Pergeseran pagu anggaran dapat dilihat pada Tabel III I Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Tabel [illegible]

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN [illegible]

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten [illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi Sebelum	Lokasi Sesudah	Capaian Program Tolok Ukur	Capaian Program Target	Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Sebelum	Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Sesudah	Target Sebelum	Target Sesudah	Hasil Kegiatan Tolok Ukur	Hasil Kegiatan Target	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10		11	12	13	14	15
[illegible]		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
[illegible]	[illegible]	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	100%			100%	100%			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							[illegible]	[illegible]	[illegible] Dokumen	[illegible] Dokumen	[illegible]	100%	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible] 2.01 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. [illegible]	Kab. [illegible]			[illegible]	[illegible]	2 Dokumen	2 Dokumen			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible] 2.01 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. [illegible]	Kab. [illegible]			[illegible]	[illegible]	2 Dokumen	2 Dokumen			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible] 2.01 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. [illegible]	Kab. [illegible]			[illegible]	[illegible]	1 Dokumen	1 Dokumen			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible] 2.01 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. [illegible]	Kab. [illegible]			[illegible]	[illegible]	1 Dokumen	1 Dokumen			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] 2.01 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. [illegible]	Kab. [illegible]			[illegible]	[illegible]	1 Dokumen	1 Dokumen			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible] 2.01 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. [illegible]	Kab. [illegible]			[illegible]	[illegible]	1 Laporan	1 Laporan			[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No.	Kode				Urusan Barang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Kondisi Sarana	Kondisi Umum	Indeks		Kinerja Program	Kinerja Kegiatan								Pagu Anggaran	Pagu Realisasi	Sisa Anggaran
											Target Umum				Fisik		Fisik Keuangan				
								Sebelum	Sesudah	Tahun Lalu	Tahun	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2				3	4	5	6		7	8	9			11		13	12	14	15	
	1	1.	1	2.01	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya [illegible] Pemerintahan Daerah	Lab. Sanggah	Kab. Sanggah		Jumlah Pakaian Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket	100 Paket				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2	1.	1.	2.01	0002	Pemeliharaan dan Perawatan [illegible] Kendaraan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya [illegible] Pemerintahan Daerah	Lab. Sanggah	Kab. Sanggah		Jumlah Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Operasional	Jumlah Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Operasional	2 Dokumen	2 Dokumen				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	3	1.	1.	2.01	0003	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Operasional	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya [illegible] Pemerintahan Daerah	Kab. Sanggah	Kab. Sanggah		Jumlah Dokumen Hasil Kontrol dan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Operasional	Jumlah Dokumen Hasil Kontrol dan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Operasional	2 Dokumen	2 Dokumen				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	4	1.	1.	2.01	0004	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Capaian Program	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya [illegible] Pemerintahan Daerah	Kab. Sanggah	Lab. Sanggah		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Capaian Program	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Capaian Program	1 Dokumen	1 Dokumen				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	5	1.	01	2.01		Administrasi Layanan Perangkat Daerah						Jumlah Layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	1 Jenis	1 Jenis		Penyediaan Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum Pelaksanaan Monitoring dan Pemeliharaan Data Kabupaten Sanggah	100%	[illegible]	[illegible]	-
	6	1.	1.	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Evaluasi [illegible] Bangunan Gedung	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya [illegible] Pemerintahan Daerah	Lab. Sanggah	Kab. Sanggah		Jumlah Paket Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dibutuhkan	Jumlah Paket Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dibutuhkan	11 Paket	11 Paket				[illegible]	[illegible]	
	7	1.	1.	2.01	0002	Penyusunan Pemutakhiran Tunjangan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya [illegible] Pemerintahan Daerah	Lab. Sanggah	Kab. Sanggah		Jumlah Paket Pemutakhiran Tunjangan yang Dibutuhkan	Jumlah Paket Pemutakhiran Tunjangan yang Dibutuhkan	1 Paket	1 Paket				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	8	1.	1.	2.01	0003	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya [illegible] Pemerintahan Daerah	Lab. Sanggah	Kab. Sanggah		Jumlah Paket Dokumen Laporan Keuangan yang Dibutuhkan	Jumlah Paket Dokumen Laporan Keuangan yang Dibutuhkan	1 Paket	1 Paket				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	9	1.	1.	2.01	0004	Penyusunan Barang Daerah dan Penggunaan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya [illegible] Pemerintahan Daerah	Lab. Sanggah	Kab. Sanggah		Jumlah Paket Barang Daerah dan Penggunaan yang Dibutuhkan	Jumlah Paket Barang Daerah dan Penggunaan yang Dibutuhkan	1 Paket	1 Paket				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	10	1.	1.	2.01	0005	Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor dan Rumah Dinas Operasional	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya [illegible] Pemerintahan Daerah	Lab. Sanggah	Lab. Sanggah		Jumlah Dokumen Sarana Gedung Kantor dan Rumah Dinas Operasional yang Dibutuhkan	Jumlah Dokumen Sarana Gedung Kantor dan Rumah Dinas Operasional yang Dibutuhkan	12 Dokumen	12 Dokumen				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	11	1.	1.	2.01	0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya [illegible] Pemerintahan Daerah	Lab. Sanggah	Lab. Sanggah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Kode				Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi		Sasaran Daerah	Lokasi		Sasaran Program		Kinerja Kegiatan						Pagu Anggaran	Realisasi Kinerja sampai dengan triwulan ini	
									Sebelum	Setelah	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target			
	1				3			5	6		7	8	9		10		11	12	13	14	15
4	13	01	1.01		Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Jumlah barang milik Daerah yang dibutuhkan	Jumlah barang milik Daerah yang dibutuhkan	5 Jenis	5 Jenis	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah yang Dibutuhkan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau	100%	221.201.000,00	[illegible]	[illegible]
1	13	01	1.01	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Pemerintahan Daerah Jabatan	Dipergunakan untuk Kantor Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Pemerintahan Daerah Jabatan yang tersedia	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Pemerintahan Daerah Jabatan yang tersedia	1 Unit	1 Unit			164.442.162,00	[illegible]	
2	13	01	1.01	002	Pengadaan meubel	Dipergunakan untuk Kantor Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau				Jumlah Paket Meubel yang tersediakan	Jumlah Paket Meubel yang tersediakan	10 Jenis	10 Jenis			41.720.000	41.720.000	
3	13	01	1.01	003	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dipergunakan untuk Kantor Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersediakan	3 Unit	3 Unit			72.000.000	[illegible]	[illegible]
4	13	01	1.01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang tersediakan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang tersediakan	3 Jenis	3 Jenis	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau	100%	221.869.944,00	[illegible]	[illegible]
1	13	01	1.01	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dipergunakan untuk Kantor Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau				Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			[illegible]	[illegible]	
1	13	01	1.01	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Dipergunakan untuk Kantor Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau				Jumlah laporan Pelaksanaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan yang Disediakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan yang Disediakan	121 Laporan	121 Laporan			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	13	01	1.01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dipelihara Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau	100%	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	13	01	1.01	001	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Pemerintahan Daerah Jabatan	Dipergunakan untuk Kantor Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Pemerintahan Daerah Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Pemerintahan Daerah Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	13	01	1.01	002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dipergunakan untuk Kantor Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit			[illegible]	[illegible]	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Capaian Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	[illegible]
								Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur Sebelum	Tolok Ukur Sesudah	Target Sebelum	Target Sesudah	Tolok Ukur	Target			
1	2				3	4	5	6		7	8	9		10		11	12	13	14	15
7	2	5	02		PROGRAM PENATAAN DESA					Persentase Desa Yang Tertata	100%			100%	100%			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2	5	02	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa							Jumlah Dokumen Penataan Desa Yang Disusun	Jumlah Dokumen Penataan Desa Yang Disusun	[illegible] Dokumen	[illegible] Dokumen	Terlaksananya Dokumen Penyelenggaraan Penataan Desa	[illegible] Dokumen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2	5	02	2.01	0001 Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau			Jumlah Desa yang Dilakukan Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa	[illegible] Desa	[illegible] Desa			[illegible]	[illegible]	
	2	5	02	2.01	0002 Fasilitasi [illegible] Desa	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penetapan Wilayahnya	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penetapan Wilayahnya	[illegible] Desa	[illegible] Desa			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2	5	02	2.01	0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	[illegible] Desa	[illegible] Desa			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2	5	02	2.01	0004 [illegible]	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau			[illegible]	[illegible]	[illegible] Laporan	[illegible] Laporan			[illegible]	[illegible]	
	2	5	02	2.01	0005 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2	5	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar Desa	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
	2	5	03	2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa							Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Yang Disusun	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Yang Disusun	[illegible] Dokumen	[illegible] Dokumen	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	[illegible] Dokumen	[illegible]	[illegible]	
	2	5	03	2.01	0001 Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	[illegible] Dokumen	[illegible] Dokumen			[illegible]	[illegible]	
	2	5	03	2.01	0002 Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	[illegible] Dokumen	[illegible] Dokumen			[illegible]	[illegible]	
	2	5	03	2.01	0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	[illegible] Dokumen	[illegible] Dokumen			[illegible]	[illegible]	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Capaian Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Pagu Perubahan	Bertambah/Berkurang
					Kabupaten	Kecamatan	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur Sebelum	Tolok Ukur Sesudah	Target Sebelum	Target Sesudah	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10		11	12	13	14	15
[illegible]	2 . 13 . 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					Persentase Pengelolaan Keuangan Desa [illegible]	100%			100%	100%			[illegible]	[illegible]	-
	2 . 13 . 01 . 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	8 Laporan	4 Laporan	Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	8 Laporan	[illegible]	[illegible]	-
	2 . 13 . 01 . 2.01 . 0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatkan Pelayanan Publik [illegible]	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Desa	Kab Sanggau	Kab Sanggau			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2 . 13 . 01 . 2.01 . 0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Meningkatkan Pelayanan Publik [illegible]	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Desa	Kab Sanggau	Kab Sanggau			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			[illegible]	[illegible]	
	2 . 13 . 01 . 2.01 . 0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatkan Pelayanan Publik [illegible]	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Desa	Kab Sanggau	Kab Sanggau			Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			[illegible]	[illegible]	
	2 . 13 . 01 . 2.01 . [illegible]	Pembinaan dan Pemberdayaan BPD, Aparat dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Meningkatkan Pelayanan Publik [illegible]	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Desa	Kab Sanggau	Kab Sanggau			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BPD Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BPD Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			[illegible]	[illegible]	
	2 . 13 . 01 . 2.01 . [illegible]	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Meningkatkan Pelayanan Publik [illegible]	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Desa	Kab Sanggau	Kab Sanggau			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan			[illegible]	[illegible]	
	2 . 13 . 01 . 2.01 . 0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Meningkatkan Pelayanan Publik [illegible]	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Desa	Kab Sanggau	Kab Sanggau			Jumlah Dokumen Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			[illegible]	[illegible]	
	2 . 13 . 01 . 2.01 . [illegible]	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Meningkatkan Pelayanan Publik [illegible]	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Desa	Kab Sanggau	Kab Sanggau			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			[illegible]	[illegible]	
	2 . 13 . 01 . 2.01 . [illegible]	Fasilitasi Penataan/Penegasan Batas Desa	Meningkatkan Pelayanan Publik [illegible]	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Desa	Kab Sanggau	Kab Sanggau			Jumlah Desa yang [illegible] Batas Desa	Jumlah Desa yang [illegible] Batas Desa	76 Desa	6 Desa			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	2 . 13 . 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					Persentase Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang [illegible]	100%			100%	100%			[illegible]	[illegible]	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja									Pagu Indikatif	Pagu Perubahan Indikatif	Bertambah/Berkurang(+/-)
											Capaian Program		Keluaran Kegiatan				Hasil Kegiatan					
													Tolok Ukur		Target							
									Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target				
1	2					3	4	5	6		7	8	9		10		11	12	13		14	15
	2	13	05	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang dibina**	**Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang dibina**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina**	**4 Laporan**	**1.808.888.131,00**		**2.180.538.137,00**	-
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen			46.794.536,00		46.794.536,00	-
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	3 Lembaga			825.901.933,00		825.901.933,00	-
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan			21.282.536,00		21.282.536,00	-
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1. Meningkatnya Status Desa 2. Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Sanggau	Kab. Sanggau			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen			24.907.130,00		23.977.130,00	(930.000,00)
						Hibah PKK													840.000.000,00		1.250.000.000,00	333.000.000,00
																		JUMLAH	**9.988.273.237,00**		**10.021.864.185,00**	**46.220.056,00**

Sanggau, 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sanggau

Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19690508 199403 1 012

Pada tabel tersebut terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami pergeseran/penambahan dan termuat pada pagu sub kegiatan lainnya dengan tetap memperhatikan kinerja keuangan dan target yang belum terealisasi.

Rekapitulasi jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan memuat rekapitulasi jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel III.2 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

TABEL III.2

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PAGU PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM		JUMLAH KEGIATAN		JUMLAH SUB KEGIATAN		JUMLAH PAGU		JUMLAH PAGU BARU (Rp)	JUMLAH KEGIATAN BARU / SUB KEGIATAN
		RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA 2025 (Rp)	APBD 2025 (Rp)		
1	2	3		4		5		6		7	8
1	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dan DESA	5 PROGRAM	5 PROGRAM	12 KEGIATAN	12 KEGIATAN	51 SUB KEGIATAN	51 SUB KEGIATAN	10.510.804.613,00	10.021.864.169,00	10.021.864.169,00	-
	JUMLAH	5 PROGRAM	5 PROGRAM	12 KEGIATAN	12 KEGIATAN	51 SUB KEGIATAN	51 SUB KEGIATAN	10.510.804.613,00	10.021.864.169,00	10.021.864.169,00	-

Sanggau, 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sanggau

Alan, S.ST
Pembina Tingkat I/IV,b
NIP.196906061994031012

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau untuk Program dan Kegiatan tidak mengalami perubahan yaitu 5 Program, 12 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan.

Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dengan pagu dan target kinerja sesudah perubahan serta alasan perubahan rencana kerja Tahun 2025 pada setiap sub kegiatan yang mengalami pergeseran, pengurangan dan penambahan pagu dapat dilihat pada tabel III 3 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

TABEL III.2

REKAPITULASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	ALASAN PERUBAHAN
							RENJA 2025	RENJA 2025	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA								10.521.864.199,00	
1					2	3	4	5	6
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesesuaian Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100%	7.504.844.427	
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	14.971.394,00	
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.160.210,00	
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.091.664,00	
2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.050.451,00	
2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.726.464,00	
2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.452.201,00	
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	859.846,00	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi	36 Dokumen	6.573.160.735,50	
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	5.193.416.720,05	
2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	1.276.296.552,00	
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Dokumen	120.950.000,00	
2	13	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3.477.797,00	
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	2.014.650,00	
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	5 Dokumen	48.003.018,36	
2	13	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	906.650,00	

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	ALASAN PERUBAHAN
							RENJA 2025	RENJA 2025	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA								16.021.864.169,00	
1					2	3	4	5	6
2	13	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.078.168,50	
2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.800.000,00	
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun	5 Dokumen	43.008.040,00	
2	13	01	2.05	0003	Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	41.131.550,00	
2	13	01	2.05	0002	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	5.051.545,00	
2	13	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	4.362.352,00	
2	13	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	7.842.452,00	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	8 Jenis	298.413.288,00	
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14.030.495,00	
2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	12.626.697,00	
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	77.061.160,00	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	33.538.443,00	
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.663.575,00	
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	111.411.000,00	Penambahan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	3 Jenis	242.621.540,00	
2	13	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	164.450.450,00	
2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	43.220.550	
2	13	01	2.07	0007	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	34.950.540	Menunjang aktifitas kerja kantor
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang yang disediakan	3 Jenis	257.401.794,00	
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	82.071.164,00	
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	145.310.630,00	Penambahan Gaji Tekon 3 Bulan (Ke 2)

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	TARGET RENJA 2025	PAGU RENJA 2025	ALASAN PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA								10.[illegible].[illegible].[illegible],00	
1					2	3	4	5	6
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	2 Jenis	115.913.000,00	
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	35.603.000,00	BBM Kendaraan Roda 4 dan Pemeliharaan Kendaraan
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	29.304.500,00	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Yang Tertata	50,00%	98.[illegible].309,00	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Dokumen Penataan Desa Yang Disusun	5 Dokumen	90.[illegible].[illegible],00	
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	2 Desa	52.837.517,00	
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	10 Desa	4.173.136,00	
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	15 Desa	4.547.206,00	
2	13	02	2.01	0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.896.[illegible],00	
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Unit	4.471.720,00	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar Desa	50,00%	71.[illegible].078,00	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota Yang Disusun	3 Dokumen	71.[illegible].078,00	
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28.906.546,00	
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.410.145,00	
2	13	03	2.01	0005	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	20.362.606,00	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Kategori Baik	100%	160.375.156,00	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	8 Laporan	160.375.156,00	

KODE					PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	ALASAN PERUBAHAN
							RENJA 2023	RENJA 2023	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA								10.471.864.189,00	
1					2	3	4	5	6
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	42.671.651,00	
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	12.062.452,00	
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	40.264.570,00	
2	13	04	2.01	0006	Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	5.136.340,00	
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	15.451.845,00	
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	5.343.026,00	
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	14.530.570,00	
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 Desa	70.934.704,00	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	100%	2.180.934.137,00	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang dibina	4 Laporan	[illegible]	
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	48.104.538,00	
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	425.361.610,00	

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	ALASAN PERUBAHAN
							RENJA 2025	RENJA 2025	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA								10.021.864.160,00	
1					2	3	4	5	6
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	21.282.536,00	
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.296.977.130,00	

Sanggau, 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sanggau

Ilian, S.ST
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP.196906081994031012

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional yang berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau memiliki arti penting sebagai tolok ukur dalam menentukan keberhasilan terwujudnya Pembangunan Kabupaten Sanggau yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan yang terpadu dibidang ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah dan sumber daya alam, serta bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dalam menunjang kelancaran Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau secara operasional akan memiliki acuan yang jelas dan tegas, dengan beberapa Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sehingga dapat menjadi pedoman teknis dalam perencanaannya. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan usulan untuk kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dimulai dari proses rancangan, rancangan akhir dan merupakan proses akhir dari Rencana Kerja (Renja) setelah adanya perbaikan-perbaikan dan usulan yang disertai dengan Pagu Indikatif Biaya yang dibutuhkan. Dengan adanya dukungan dana yang memadai diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan tujuan yang ditetapkan dalam sasarannya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau disusun sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, terimakasih.